

ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN PENANGGULANGAN DAERAH TERTINGGAL DI PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE

Muhammad Aswar Limi¹⁾ dan Lukman Yunus¹⁾

¹⁾Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari
Email : aswar_agribusiness@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan Potensi dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Lokasi penelitian diarahkan pada wilayah Kecamatan pesisir yang termasuk kategori daerah tertinggal dengan mengacu pada SK Bupati Konawe tentang Penunjukan/Penetapan Lokasi Program Kampung Perisai di Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2015 dan yang menjadi desa sampel yaitu Desa Saponda dan Desa Telaga Biru. Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Desa Saponda memiliki potensi yang meliputi potensi perekonomian masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, jumlah penduduk usia kerja yang tinggi yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, mayoritas kepala keluarga telah memiliki perumahan, infrastruktur wilayah yang cukup memadai yang diusahakan secara swadaya serta potensi ekonomi desa yang berasal dari hasil perikanan tangkap. Desa Telaga Biru memiliki potensi meliputi potensi perekonomian masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, jumlah penduduk usia kerja yang tinggi, mayoritas kepala keluarga telah memiliki perumahan, infrastruktur wilayah yang telah memadai, nilai celah fiskal yang berasal dari PBB mencapai Rp.3.988.555,- potensi ekonomi desa berasal dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Permasalahan yang ditemui di Desa Saponda yaitu kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan budidaya perikanan dan penangkapan ikan sehingga beberapa masyarakat menggunakan bom untuk menangkap ikan, lapangan usaha baru yang terbatas sehingga masih terdapat penduduk yang menganggur, jumlah penduduk yang bersekolah masih rendah karena tidak terdapatnya sarana pendidikan berupa SD, SMP dan SMA di desa serta tingginya angka putus sekolah yang juga disebabkan oleh faktor ekonomi, tidak adanya infrastruktur PLN, telekomunikasi, sanitasi, kesehatan serta MCK, tidak adanya sarana transportasi umum serta tidak adanya pasar desa yang mendukung perekonomian masyarakat. Permasalahan yang ditemui di Desa Telaga Biru yaitu kondisi tanah yang kurang subur untuk mendukung kegiatan pertanian, produksi perkebunan yang rendah, banyak ternak yang terserang penyakit, sarana prasarana perikanan budidaya dan penangkapan yang minim, lapangan usaha baru tidak tersedia sehingga jumlah penduduk menganggur yang tinggi, tidak adanya SD, SMP dan SMA di desa sehingga jumlah penduduk yang tidak bersekolah masih tinggi, tidak adanya infrastruktur, sanitasi, kesehatan serta MCK, tidak adanya pasar desa yang mendukung perekonomian masyarakat.

Kata kunci : *Potensi, Permasalahan, Daerah Tertinggal, Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe*

1. PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014, ditetapkan daftar 183 kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria utama, yaitu : (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia; (3) infrastruktur (prasarana); (4) kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah. Selain kriteria dasar tersebut, juga dipertimbangkan kondisi kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, daerah rawan bencana dan daerah yang ditentukan secara khusus.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015–2019. Dalam perpres itu disebutkan bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah

lain dalam skala nasional dan ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang termasuk dalam kategori tertinggal adalah Kabupaten Konawe. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat desa-desa yang termasuk dalam kategori tertinggal, salah satunya di daerah pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dilihat dari kriteria aspek perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, ketersediaan infrastruktur (prasarana), kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Penetapan Kabupaten Konawe sebagai salah satu Kabupaten tertinggal, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, mengingat dari keenam kriteria penetapan daerah tertinggal, justru terdapat beberapa kriteria yang seharusnya menjadi kekuatan dan peluang pengentasan daerah tertinggal di Kabupaten Konawe,

Diperlukan terobosan kebijakan dan program pembangunan dan diutamakan pada daerah-daerah yang relatif tertinggal terutama daerah yang berada di wilayah pesisir, melalui program dan rencana kegiatan percepatan penanggulangan daerah tertinggal namun terobosan tersebut dapat dilakukan apabila data dan informasi yang dimiliki akurat. Sehingga dengan data yang akurat yang dimiliki maka daerah-daerah yang termasuk kategori tidak tertinggal perlu dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan pembangunannya, agar tetap mampu dipertahankan sebagai daerah maju dalam jangka panjang dan daerah yang tertinggal dapat segera dilakukan pembangunan agar dapat keluar dari ketertinggalannya.

Salah satu kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperoleh data dan informasi akurat dalam rangka mempercepat penanggulangan daerah-daerah tertinggal di Kabupaten Konawe yaitu dengan melakukan analisis Potensi dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kabupaten Konawe sehingga dengan data dan informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk menyusun strategi pembangunan daerah dengan tujuan mengentaskan desa-desa yang masih tertinggal agar menjadi daerah tidak tertinggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan Potensi dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain.

Selanjutnya, wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya. Pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah.

Pada hakekatnya pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal sering menghadapi persoalan yaitu adanya tumpangtindih kegiatan dengan program penanggulangan kemiskinan. Secara umum, memang beberapa kegiatan program pembangunan daerah tertinggal pada dasarnya sama dengan program penanggulangan kemiskinan yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terisolir, tertinggal, terpencil dan miskin. Namun, dalam program pembangunan wilayah tertinggal targetnya lebih luas mengingat bukan hanya manusia atau masyarakat saja yang perlu dibenahi, melainkan pengembangan aspek spasial yaitu wilayah yang memiliki fungsi tertentu agar wilayah dengan fungsi tertentu atau wilayah tersebut berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Bappenas (2004) wilayah tertinggal secara umum dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan letak geografisnya yaitu wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil yaitu

- a. Kondisi masyarakat pulau-pulau kecil di wilayah terpencil masih sangat marjinal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan.
- b. Terdapat 88 pulau kecil yang bertitik dasar dan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.
- d. Kondisi pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun akibat kegiatan manusia.
- e. Adat istiadat, budaya dan agama masyarakat pulau-pulau kecil yang spesifik dan pada umumnya bertentangan dengan adat, budaya yang dibawa oleh pendatang/wisatawan, sehingga akan menghambat proses pembaharuan.

2.2. Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

Pemilihan lokasi daerah tertinggal bukan ditentukan dari tingkat propinsi ataupun pemerintah pusat, tapi ada hal-hal yang menjadi indikator dari pemerintah dalam menetapkan suatu daerah termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu : (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan(6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik.

Bappenas (2004) menyebutkan bahwa faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal yaitu antara lain :

- a. Geografis : secara geografis wilayah tertinggal relatif sulit dijangkau akibat letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir dan pantai pulau-pulau terpencil, ataupun karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh perkembangan jaringan, baik transportasi maupun media komunikasi.
- b. Sumberdaya alam : beberapa wilayah tertinggal terjadi akibat rendah/miskinnya potensi sumberdaya alam seperti daerah kritis minus atau lingkungan sekitarnya merupakan wilayah yang dilindungi atau tidak bisa dieksploitasi, sehingga masyarakat sulit mendapatkan mata pencaharian yang memadai.
- c. Sumberdaya manusia : pada umumnya masyarakat di wilayah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, serta pada umumnya terikat atau masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan sulit menerima nilai-nilai baru. Di samping itu, kelembagaan adat pada sebagian masyarakat pedalaman belum berkembang. Dalam kondisi demikian, walaupun daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial namun tidak diolah dengan baik atau dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan pihak tertentu.
- d. Kebijakan pembangunan : suatu wilayah dapat tertinggal karena beberapa faktor kebijakan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, kesalahan prioritas penanganan dan strategi atau pendekatan, tidak diakomodasikannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan penanganan pembangunan sehingga mengakibatkan penanganan wilayah tertinggal selama ini salah sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa daerah tertinggal sangat kompleks dengan permasalahan-permasalahan, hal inilah yang menjadi tantangan bagi stakeholders dalam upaya penanganan pembangunan daerah tertinggal. Namun, sekelumit permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus pada daerah yang dimaksud, agar dalam membuat suatu strategi pembangunan daerah tertinggal dapat dirumuskan langkah-langkah yang strategis sehingga pencapaian target bisa lebih tepat pada sasaran.

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004), secara agregat permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
- b. Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah.

- c. Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi bagi upaya pengembangan ekonomi lokal.
- d. Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang.
- e. Daerah perbatasan antar Negara selama ini orientasi pembangunannya bukan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih menekankan aspek keamanan (security approach), sehingga terjadi kesenjangan yang sangat lebar dengan daerah perbatasan Negara tetangga.
- f. Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya.

Menurut Wanggai (2004) persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kawasan tertinggal antara lain : rendahnya kualitas ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk, kesenjangan antar wilayah dan antar desa-kota, rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, isolasi wilayah, rendahnya kehadiran investor , dan rendahnya keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar usaha ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Analisis Potensi dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe diarahkan pada wilayah Kecamatan pesisir yang termasuk kategori daerah tertinggal dengan mengacu pada SK Bupati Konawe tentang Penunjukan/Penetapan Lokasi Program Kampung Perisai Di Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2015

Lokasi pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kecamatan yang memiliki desa pesisir yang dapat menggambarkan karakteristik desa tertinggal, dengan menggunakan 5 kriteria yaitu: (a) Sebaran wilayah kecamatan yang memiliki desa tertinggal; (b) karakteristik wilayah (wilayah daratan dan pesisir/lautan); (c) Aksesibilitas dan jarak terhadap ibukota Kabupaten; (d) ketersediaan infrastuktur struktur wilayah; dan (e) Potensi ekonomi masyarakat (pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, kehutanan). Atas dasar pertimbangan kriteria tersebut diatas, maka dipilih Kecamatan Soropia yang memiliki desa pesisir tertinggal yang dianggap sebagai perwakilan dari seluruh daerah pesisir tertinggal di Kabupaten Konawe dan yang menjadi desa sampel yaitu Desa Saponda dan Desa Telaga Biru



Gambar 1. Peta Kabupaten Konawe

3.2. Penentuan Responden

Responden yang akan diwawancarai meliputi: (1) Kepala Desa, (2) Camat, (3) Masyarakat, (4) BAPPEDA, (5) Badan atau SKPD Terkait. Metode penentuan responden menggunakan pendekatan purposive atas dasar pemahaman terhadap tujuan kegiatan, keterlibatan dalam pembangunan desa tertinggal. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sesuai dengan stratifikasi kelompok sasaran kajian, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) keterkaitan dengan tujuan kegiatan, (2) ketepatan dan kemudahan memperoleh data/informasi, (3) ketepatan dalam menjawab setiap pertanyaan, dan (4) representasi dari populasi

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan dalam menganalisis Potensi dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari data/informasi yang bersumber dari dinas/instansi terkait di Kabupaten Konawe. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan kecamatan dan desa tertinggal dengan menggunakan 6 kriteria dan 27 indikator percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkaitan dengan aspek: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur dasar wilayah, aspek pendidikan dan kesehatan, aspek keuangan daerah dan aspek kondisi keterbatasan wilayah.

3.4. Analisis Data

Metode analisis pada dalam menganalisis Potensi dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe digunakan untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan.. Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif, diantaranya:

a. Analisis Potensi Sektor/Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Analisis potensi sektor/kegiatan ekonomi masyarakat bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan mata pencaharian masyarakat, potensi produksi dan volume usaha serta peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal. Adanya peningkatan pendapatan akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi, serta penanggulangan kemiskinan penduduk.

Persamaan untuk menganalisis potensi sektor ekonomi masyarakat menggunakan analisis pendapatan, sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Dimana :

π = Pendapatan Usaha (Rp / thn)

TR = Total penerimaan (*Total Revenue*) (Rp / thn)

TC = Total biaya (*Total Cost*) (Rp / thn)

Sementara untuk menghitung tingkat konsumsi perkapita menggunakan persamaan :

$$\text{Konsumsi perkapita} = \text{Total Pengeluaran RT} / \text{Jumlah Anggota RT}$$

b. Analisis Kapasitas Sumberdaya Manusia

Analisis ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap aspek-aspek sumberdaya manusia, yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Persamaan yang digunakan sebagai berikut:

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

2) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah tahun bersekolah dapat digunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_i}{n}$$

Dimana :

\bar{X} = Rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk usia 5 tahun keatas

x_i = Jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun keatas

n = Jumlah penduduk usia 5 tahun keatas.

3) Angka Melek Huruf

$$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Dimana:

LIT_{15+}^t = Angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t

L_{15+}^t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t

P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

c. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap aspek kebutuhan prasarana (infrastruktur) wilayah daerah tertinggal, yaitu: kondisi jalan, penggunaan listrik, telepon, air bersih, ketersediaan pasar permanen, fasilitas kesehatan dan dokter, serta fasilitas pendidikan SD sampai SMA. Analisis ini merupakan analisis terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan baik dari segi jumlah, jenis dan kualitas pelayanan yang diberikan di kawasan perencanaan, serta untuk memperkirakan jenis dan jumlah fasilitas beserta luas kebutuhan ruang yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis fasilitas. Analisis ini mengacu pada Standar Direktorat Jenderal Cipta Karya yang disesuaikan dengan kondisi kawasan perencanaan, berikut ini ketentuan pada masing-masing jenis fasilitas:

- 1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dihitung dengan cara (Panjang jalan kondisi baik : Panjang jalan seluruhnya) x 100%.
- 2) Fasilitas Pendidikan, untuk tingkat Taman Kanak-kanak (TK) jumlah penduduk pendukung 1.000 jiwa, Sekolah Dasar (SD) penduduk pendukung 1.600 jiwa, Sekolah Menengah Lanjutan Pertama (SMP) penduduk pendukung 4.800 jiwa, Sekolah Menengah Atas (SMU/SMK) penduduk pendukung 4.800 jiwa dan pendidikan informal penduduk pendukungnya 5.000 jiwa.
- 3) Fasilitas Kesehatan, untuk jenis Posyandu penduduk pendukungnya 750 jiwa, Balai Pengobatan penduduk pendukung 2.500 jiwa, Puskesmas Pembantu (Pustu) penduduk pendukung 10.000 jiwa, Apotek penduduk pendukung 10.000 jiwa, Tempat Praktek Dokter penduduk pendukung 5.000 jiwa dan Rumah Sakit penduduk pendukungnya 240.000 jiwa.
- 4) Fasilitas Perdagangan dan Jasa, untuk Warung penduduk pendukung 250 jiwa, Kios penduduk pendukung 1.000 jiwa, Toko penduduk pendukung 2.500 jiwa, Pasar penduduk pendukung 30.000 jiwa, Bengkel dan Servis penduduk pendukung 10.000 jiwa dan Biro Jasa Perjalanan penduduk pendukungnya 10.000 jiwa.
- 5) Fasilitas Olahraga dan Rekreasi, untuk Taman Bermain Anak penduduk pendukungnya 2.500 jiwa, Tempat Bermain Umum penduduk pendukung 10.000 jiwa, Lapangan Olahraga Terbuka penduduk pendukung 30.000 jiwa, Lapangan Olahraga Tertutup penduduk pendukung 30.000 jiwa dan Bioskop penduduk pendukungnya 30.000 jiwa.
- 6) Fasilitas Umum, untuk fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum penduduk pendukungnya 5000 jiwa, Warung Telekomunikasi (Wartel) penduduk pendukungnya 10.000 jiwa, Halte dan Tempat Pemakaman Umum penduduk pendukungnya 10.000 jiwa.

d. Analisis Keuangan Daerah

Analisis keuangan daerah menggunakan pendekatan perhitungan pertumbuhan PDRB dan PAD. Persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$$

Dimana:

t+1 = Tahun pengamatan PDRB

t = Tahun pengamatan PDRB sebelumnya

e. Analisis Aksesibilitas Wilayah

Analisis aksesibilitas wilayah dihitung dengan pendekatan model Garvitasi, dengan menggunakan indkes aksesibilitas. Tahapan perhitungan :

$$A_{ij} = \frac{E_j}{d_{ij}^b}$$

Dimana :

A_{ij} = Indeks aksesibilitas untuk kawasan I dalam hubungannya dengan kawasan lainnya

E = Jumlah tenaga kerja di kawasan j

d = Jarak fisik dari i ke j

b = Nilai eksponen

f. Analisis Kondisi Daerah

Analisis kondisi daerah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal mencakup: kejadian bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan bencana alam), luas kawasan lindung, lahan kritis dan rawan konflik. Persamaan yang digunakan sebagai berikut:

1) Gempa Bumi:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah mengalami gempa bumi}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah}} \times 100$$

2) Tanah Longsor:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah tanah longsor}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

3) Banjir:

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah tanah longsor}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

4) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis:

$$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$$

5) Luas Kawasan Lindung:

$$\frac{\text{Luas Kawasan Hutan Lindung}}{\text{Luas total Wilayah}} \times 100\%$$

6) Kejadian Konflik:

$$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sumberdaya Ekonomi Wilayah

Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, wujudnya berupa barang atau jasa. Sumber daya ekonomi terdiri atas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Sedangkan Sumber Daya Manusia adalah segala kegiatan manusia baik fisik maupun rohani yang ditunjukkan untuk kegiatan produksi.

Pemanfaatan sumberdaya ekonomi secara baik, diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan pendapatan dan konsumsi perkapita masyarakat. Jumlah Penduduk Miskin, Pendapatan dan Konsumsi Perkapita Masyarakat Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Penduduk Miskin, Pendapatan dan Konsumsi Perkapita di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Indikator	Jumlah
Saponda	Penduduk Miskin (KK)	161
	Pendapatan Per KK (Rp)	700.000
	Konsumsi Perkapita (Kg)	20
Telaga Biru	Penduduk Miskin (KK)	130
	Pendapatan Per KK (Rp)	800.000
	Konsumsi Perkapita (Kg)	100

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan data pada table diatas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Saponda sebanyak 161 kepala keluarga dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp.700.000,- per kepala keluarga sedangkan di Desa Telaga Biru jumlah penduduk miskin sebanyak 130 kepala keluarga dengan pendapatan sebesar Rp. 800.000,-. Rendahnya pendapatan masyarakat Desa Saponda dikarenakan sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian utama sebagai nelayan yang terpengaruh oleh musim serta alat tangkap yang dimiliki, sedangkan masyarakat Desa Telaga Biru sebagian besar bermata pencaharian utama sebagai petani yang jumlah pendapatannya tidak menentu tergantung dari kesuburan lahan yang dimiliki serta jumlah produksi dan harga jual serta biaya yang digunakan selama mengolah kebun dan lahan pertaniannya. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Saponda dan Telaga Biru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Mata pencaharian	Jumlah (orang)	Rata-Rata Pendapatan Perbulan/orang
Saponda	Petani	0	0
	Pekebun	0	0
	Nelayan	201	500.000
	PNS	0	0
	Swasta	12	1.000.000
Telaga Biru	Petani	114	750.000
	Pekebun	1	750.000
	Nelayan	15	750.000
	PNS	12	2.400.000
	Swasta	20	2.000.000

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 201 orang penduduk Desa Saponda bermata pencaharian sebagai nelayan dan 12 orang bekerja swasta dengan jumlah rata-rata pendapatan antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,- sedangkan penduduk Desa Telaga Biru bermata pencaharian utama sebagai petani sebanyak 114 orang dan sebagai nelayan/PNS sebanyak 27 orang serta yang berwirausaha sebanyak 20 orang dengan tingkat pendapatan rata-rata Rp 750.000,- – Rp 2.400.000,-

4.2. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia atau SDM itu merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Atau secara singkat SDM itu merupakan sumber daya yang berasal dari manusia. Keadaan Sumberdaya Manusia Masyarakat Desa Saponda dan Telaga Biru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Aspek Sumberdaya Manusia di di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Aspek SDM	Indikator	Orang	
Saponda	Tenaga Kerja	Penduduk bekerja	141	
		Penduduk Menganggur	36	
	Angka Harapan Hidup Bayi (umur <1 Tahun)	Bayi Lahir	18	
		Bayi Meninggal	1	
	Angka Harapan Hidup Bayi (umur 1 – 5 Tahun)	Bayi Lahir	15	
		Bayi Meninggal	1	
	Angka Harapan Penduduk Usia Lanjut	Penduduk Meninggal	4	
		Usia Rata-rata Penduduk Meninggal	55	
	Telaga Biru	Tenaga Kerja	Penduduk bekerja	105
			Penduduk Menganggur	250
Angka Harapan Hidup Bayi (umur <1 Tahun)		Bayi Lahir	10	
		Bayi Meninggal	0	
Angka Harapan Hidup Bayi (umur 1 – 5 Tahun)		Bayi Lahir	10	
		Bayi Meninggal	0	
Angka Harapan Penduduk Usia Lanjut		Penduduk Meninggal	5	
		Usia Rata-rata Penduduk Meninggal	50	

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 141 orang masyarakat Desa Saponda memiliki pekerjaan dan hanya 36 orang yang menganggur dan dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir di Desa Saponda terdapat 18 kelahiran bayi hidup dibawah usia 1 tahun dan 1 bayi meninggal akibat penyakit muntaber dan terdapat 15 bayi hidup usia 1-5 tahun dan 1 bayi meninggal akibat diare. Angka harapan hidup untuk penduduk usia lanjut diketahui selama 1 tahun terakhir terdapat 4

penduduk lanjut usia yang meninggal dengan usia rata-rata 55 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Desa Telaga biru diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir di Desa Telaga Biru terdapat 10 kelahiran bayi hidup dibawah usia 1 tahun dan tidak ada bayi meninggal dan terdapat 10 bayi hidup usia 1-5 tahun dan tidak ada bayi meninggal. Angka harapan hidup untuk penduduk usia lanjut diketahui selama 1 tahun terakhir terdapat 5 penduduk lanjut usia yang meninggal dengan usia rata-rata 50 tahun.

Tabel 4. Jumlah Jenis Sekolah dan rata-rata lama pendidikan di di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah (Unit)	Rata-Rata Lama Pendidikan (Thn)
Saponda	TK	1	3
	SD	0	0
	SMP	0	0
	SMA	0	0
Telaga Biru	TK	1	2
	SD	0	0
	SMP	0	0
	SMA	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa di Desa Saponda tidak terdapat sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dan hanya terdapat 1 TK dengan rata-rata lama pendidikan selama 3 tahun dan telah melebihi rata-rata lama pendidikan normal sedangkan di Desa Telaga Biru terdapat 1 sekolah jenjang TK dengan rata-rata lama pendidikan mencapai 2 tahun namun tidak ditemukan adanya SD dan SMP serta SMA.

4.3. Sarana dan Prasarana

Dalam berkehidupan manusia akan melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendukung mereka untuk tetap dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk dapat melakukan aktivitasnya tersebut, masyarakat membutuhkan suatu pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung mereka dalam beraktivitas. Berbagai pelayanan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas ini disebut juga dengan sarana dan prasarana infrastruktur.

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sedangkan definisi lain infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Kondisi Infrastruktur Desa Saponda dan Telaga Biru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. Kondisi Infrastruktur di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Infrastruktur	Jenis Jalan	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Kondisi
Saponda	Jalan	Aspal	0	0	0
		Tanah Diperkeras	0	0	0
		Tanah Biasa	0	0	0
		Jalan Lainnya	0	0	0
	Drainase	Jalan	0	0	0
		Perumahan	0	0	0
Telaga Biru	Jalan	Aspal	1.5	3.5	Baik
		Tanah Diperkeras	0.5	3.5	Baik
		Tanah Biasa	1	1.5	Rusak
		Jalan Lainnya	0	0	0
	Drainase	Jalan	1	0.8	Baik
		Perumahan			

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa di Desa Saponda tidak memiliki jalan beraspal, jalan tanah diperkeras dan jalan biaya dan selama ini, masyarakat desa hanya menggunakan berpasir untuk beraktifitas dengan kondisi relative baik dan disepanjang jalan tersebut tidak ditemukan adanya drainase. Sedangkan di Desa Telaga Biru terdapat 1.5 km jalan beraspal dengan kondisi baik dan terdapat drainase dan sepanjang 1.5 km jalan tanah dengan kondisi rusak tanpa drainase

Tabel 6. Kondisi Listrik di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Penerangan	Jumlah Rumah Tangga (kk)	Jarak Kelokasi Sumber
Saponda	Listrik PLN	0	0
	Listrik Non PLN	50	0
	Mikro Hidro	0	0
	Petromax	0	0
	Pelita	0	0
Telaga Biru	Listrik PLN	50	0
	Listrik Non PLN	0	0
	Mikro Hidro	0	0
	Petromax	5	0
	Pelita	0	0
	Menyambung	29	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dan hasil pengamatan diketahui bahwa seluruh rumah tangga yang terdapat di Desa Saponda tidak memiliki aliran listrik PLN karena lokasi geografis desa tersebut sebagai pulau terluar di Kabupaten Konawe yang tidak memungkinkan untuk memiliki instalasi listrik PLN sehingga warga Desa Saponda memanfaatkan listrik non PLN sebagai penerang di malam hari. Sedangkan di Desa Telaga Biru sebanyak 50 kk memiliki penerangan yang bersumber dari PLN namun masih terdapat 29 kk yang belum memiliki sambungan listrik dari PLN dikarenakan biaya pasang baru listrik yang sangat mahal dan waktu tunggu yang sangat panjang sehingga warga desa memilih untuk menyambung listrik dari tetangga terdekat lebih lanjut diketahui bahwa masih terdapat 5 kk yang menggunakan pelita disebabkan jauhnya sumber aliran listrik PLN sehingga menjadi hambatan utama warga desa yang jauh dari desa untuk menikmati sumber aliran listrik sehingga masih menggunakan pelita untuk penerangan di malam hari.

Tabel 7. Sumber dan jumlah Rumahtangga Pengguna Air Bersih di di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Sumber Air Bersih	Jumlah Pengguna (KK)	Sumber Air Bersih	Rata-rata Jarak ke lokasi sumber Air bersih (m)
Saponda	Perpipaan/PDAM	0	0	0
	Ledeng	0	0	0
	Mata Air	0	0	0
	Sumur	177	0	1 Jam Perjalanan Laut
	Sungai	0	0	0
	Lainnya	0	0	0
Telaga Biru	Perpipaan/PDAM	0	0	0
	Ledeng	0	0	0
	Mata Air	15	0	150
	Sumur	49	0	50
	Sungai	0	0	0
	Lainnya	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 177 kepala keluarga di Desa Saponda memanfaatkan sumur yang berada di desa daratan sebagai sumber air bersih yang ditempuh melalui perjalanan laut selama 1 jam. Sedangkan di Desa Telaga Biru 49 kk memanfaatkan sumur dan 15 kk memanfaatkan mata air sebagai sumber air bersih sehari hari dengan jarak rata-rata dari sumber air sejauh 50 - 150 m.

Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Telepon di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Telepon	Jumlah Pengguna (Orang)	Jarak Kelokasi Sumber (Km)
Saponda	Rumah	0	0
	Handphone	0	0
Telaga Biru	Rumah	0	0
	Handphone	95	2

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa di Desa Saponda dan Telaga Biru tidak terdapat telepon rumah dikarenakan tidak adanya jaringan kabel telepon maupun fasilitas telepon satellite. Di Desa Telaga Biru sebanyak 95 orang masyarakat telah memiliki handphone karena di desa tersebut terdapat sinyal jaringan telepon seluler dengan sumber sinyal berjarak 2 km.

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa di Desa Saponda dan Desa Telaga Biru tidak terdapat pasar yang dapat digunakan menjual dan memperoleh bahan produksi sehingga menghilangkan peluang untuk mendapatkan pendapatan bagi desa melalui retribusi pasar desa dan menyulitkan penduduk desa untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari.

Di Desa Saponda tidak memiliki prasarana kesehatan sehingga seluruh pelayanan kesehatan warga Desa Saponda dilakukan di rumah sakit yang terdapat di ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan di Desa Telaga Biru hanya terdapat 1 posyandu dengan luas bangunan 50 m² dengan kondisi rusak. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan warga Desa Telaga Biru memanfaatkan puskesmas kecamatan atau langsung ke rumah sakit yang terdapat di ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan di posyandu desa tidak ada tenaga medis serta tidak ada peralatan dan obat-obatan. Desa Saponda dan Desa Telaga Biru tidak ditemui adanya dokter umum maupun dokter gigi dokter

Tabel 9. Jenis, Jumlah dan Kondisi Prasana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dll) di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Sekolah	Jarak Sekolah (km)	Jumlah Sekolah (Unit)	Luas Rata Sekolah (M2)	Rata2 Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Bangunan (Baik; Rusak)	Tenaga Pendidik (tersedia, kurang tersedia)	Ketersediaan Peralatan dan Buku (lengkap, kurang, tdk lengkap)
Saponda	TK	1	1	36	3	Kurang	Kurang	Tidak Lengkap
	SD	0	0	0	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0	0	0	0
	SMA	0	0	0	0	0	0	0
Telaga Biru	TK	0.75	1	180	2	Baik	Kurang	Tidak Ada
	SD	0	0	0	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0	0	0	0
	SMA	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Desa Saponda hanya terdapat 1 TK dengan jarak dari pemukiman warga sekitar 1 km dengan rata-rata luas TK 36 m² dan hanya memiliki 3 ruang kelas dengan kondisi bangunan yang kurang baik dan jumlah tenaga pendidik yang kurang tersedia yaitu sebanyak 3 orang guru tidak tetap dengan jumlah murid sebanyak 57 orang serta ketersediaan peralatan dan buku-buku pelajaran yang tidak lengkap, sedangkan di Desa Telaga Biru hanya terdapat 1 TK dengan jarak dari pemukiman warga sekitar 0.75 km dengan rata-rata luas TK 180 m² dan hanya memiliki 2 ruang kelas dengan kondisi bangunan yang baik namun jumlah tenaga pendidik yang kurang tersedia yaitu sebanyak 2 orang dengan jumlah murid sebanyak 20 orang serta ketersediaan peralatan dan buku-buku pelajaran yang tidak lengkap

Tabel 10. Kondisi Perumahan Penduduk di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Rumah	Jumlah Bangunan	Rata-Rata Luas Bangunan (m ²)	Jumlah Kondisi Baik (unit)	Jumlah Kondisi Rusak (unit)
Saponda	Permanen	0	0	0	0
	Semi Permanen	37	60	20	17
	Papan	56	35	40	6
	Bambu/Jelaja	0	0	0	00
	Panggung	48	35		48

Tabel 10, Lanjutan

Desa	Jenis Rumah	Jumlah Bangunan	Rata-Rata Luas Bangunan (m ²)	Jumlah Kondisi Baik (unit)	Jumlah Kondisi Rusak (unit)
Telaga Biru	Permanen	29	70	15	14
	Semi Permanen	13	45	0	13
	Papan	35	30	7	28
	Bambu/Jelaja	2	35	0	2
	Panggung	1	40	0	1

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa masyarakat Desa Saponda tidak memiliki rumah permanen dan hanya memiliki 37 rumah semi permanen serta mayoritas penduduk Desa Saponda hanya memiliki rumah papan sebanyak 56 unit dengan luas rata-rata 35 m² dimana hanya 40 unit yang masuk dalam kondisi baik dan 6 unit dalam kondisi rusak dan terdapat 48 kepala keluarga yang memiliki rumah panggung dimana hanya 35 unit yang termasuk dalam kategori baik dan 13 unit dalam kategori rusak. Sedangkan di Desa Telaga Biru terdapat 29 rumah permanen dengan luas rata-rata 70m² dan yang berada dalam kondisi baik sebanyak 15 unit dan 14 unit dalam kondisi rusak. Selanjutnya diketahui pula bahwa terdapat 13 unit semi permanen dengan luas rata-rata 45 m² yang keseluruhannya termasuk dalam kategori rusak. Lebih lanjut diketahui pula bahwa umumnya perumahan masyarakat Desa Telaga Biru terbuat dari papan kualitas rendah sebanyak 35 unit dengan luas 30m² dan hanya 7 unit dalam kondisi baik dan 28 unit dalam kondisi rusak. Selain itu di Desa Telaga Biru juga terdapat rumah bambu/jelaja sebanyak 2 unit dan 1 unit rumah panggung yang keseluruhannya termasuk dalam kategori rusak.

Jenis rumah yang dimiliki oleh penduduk desa juga mempengaruhi kondisi MCK yang dimiliki dan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa di Desa Saponda hanya 27 kk memiliki rumah yang telah memiliki MCK pribadi dan selebihnya memanfaatkan MCK umum sebanyak 2 unit sedangkan di Desa Telaga Biru terdapat 30 kk yang telah memiliki MCK pribadi dan tidak terdapat MCK umum sedangkan jumlah rumah yang belum memiliki MCK sebanyak 49 kk dan memanfaatkan kali dan kebun untuk keperluan MCK. Kondisi MCK di Desa dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 11. Kondisi MCK di Desa Soropia dan Saponda Tahun 2015

Desa	MCK	Jumlah	Kondisi
Saponda	Pribadi RT	27	Baik
	Umum	2	Rusak
Telaga Biru	Pribadi RT	30	Baik
	Umum	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

4.4. Sumber Keuangan

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa, tentunya diperlukan pendapatan desa agar tujuan membangun desa dan desa membangun tercapai. Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam UU Desa adalah Alokasi Desa : (PBB, pajak, retribusi, dll) Desa Saponda dan Telaga Biru Dana Desa (ADD). Sumber dan Jumlah Pendapatan Desa dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 12. Sumber dan Jumlah Pendapatan Desa : (PBB, pajak, retribusi, dll) di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Pendapatan Desa	Jumlah Pendapatan/thn (Rp)	Hambatan Peningkatan Pendapatan Desa
Saponda	PBB	0	0
	Retribusi	0	0
	Pajak	0	0

Tabel 12. Lanjutan

Desa	Jenis Pendapatan Desa	Jumlah Pendapatan/thn (Rp)	Hambatan Peningkatan Pendapatan Desa
Telaga Biru	PBB	3.988.555	Pemilik di Luar Desa, Data tidak akurat, Kesadaran yang rendah
	Retribusi	0	0
	Pajak	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa jenis pendapatan yang terdapat di Desa Telaga Biru hanyalah pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 3.988.555 namun dalam proses pengumpulannya setiap tahun mengalami kendala yaitu banyaknya lahan yang pemiliknya di luar desa, data tidak akurat, Kesadaran yang rendah untuk membayar pajak sehingga desa berpotensi mengalami kerugian.

4.5. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas juga merupakan ukuran kenyamanan atau kemudahan suatu tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Jalur tempuh dan alat transportasi desa dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 13. Jalur Tempuh dan alat Transportasi di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jalur Tempuh	Jarak (Km)	Alat Transportasi
Saponda	Desa ke Kecamatan	10	Kapal Laut
	Desa ke Kabupaten	73	Kapal Lau dan Sepeda Motor/Mobil
Telaga Biru	Desa ke Kecamatan	0.5	Sepeda Motor
	Desa ke Kabupaten	100	Sepeda Motor

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jalur tempuh Desa Saponda ke kecamatan sejauh 10 km dan dari desa ke kabupaten sejauh 73 km yang ditempuh menggunakan kapal laut dan sepeda motor dikarenakan fasilitas transportasi yang terdapat di desa tersebut hanyalah kapal laut dan sepeda motor dan tidak terdapat angkutan umum namun dengan hanya mengandalkan kapal laut dan sepeda motor aksesibilitas di desa mudah dilakukan. Selain jalur ke desa juga terdapat, jalur tempuh ke fasilitas pendidikan yang dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 14. Jalur tempuh ke fasilitas pendidikan di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Tingkat Pendidikan	Jarak (Km)	Frekuensi Kesekolah	Ketersediaan Guru	Biaya Pendidikan
Saponda	TK	1	Setiap Hari	Kurang	0
	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0
	SMA	0	0	0	0
Telaga Biru	TK	0.75	Setiap Hari	Kurang	0
	SD	0	0	0	0
	SMP	0	0	0	0
	SMA	0	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa jarak tempuh ke sekolah di masing-masing desa masih relative muda untuk tingkatan TK karena masih terletak di dalam desa dengan frekuensi kesekolah setiap hari namun ketersediaan guru yang masih kurang dan yang menjadi kendala adalah aksesibilitas ke sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang letaknya tidak berada di desa sehingga menyulitkan bagi setiap siswa tingkat SD, SMP dan SMA untuk ke sekolah dikarenakan tidak adanya fasilitas angkutan umum.

Selain aksesibilitas ke desa dan aksesibilitas ke sarana pendidikan, juga terdapat aksesibilitas ke sarana kesehatan. Jalur tempuh ke fasilitas Kesehatan dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 15. Jalur Tempuh ke Fasilitas Kesehatan di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Prasarana	Jarak ke prasarana (m ²)	Tenaga Medis (tersedia, kurang tersedia)	Ketersediaan Peralatan & Obat-obatan (lengkap, kurang, tdk lengkap)
Saponda	Puskesmas	0	0	0
	Poskesdes	0	0	0
	Polindes	0	0	0
	Posyandu	0	0	0
	Poliklinik	0	0	0
Telaga Biru	Puskesmas	0	0	0
	Poskesdes	0	0	0
	Polindes	0	0	0
	Posyandu	0.95	Kurang	Tidak Lengkap
	Poliklinik	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa aksesibilitas kesarana kesehatan khususnya di Desa Saponda masih menggunakan angkutan laut dan dilanjutkan dengan angkutan darat menuju rumah sakit yang terdapat di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan tidak adanya sarana kesehatan di desa tersebut sedangkan di Desa Telaga Biru warga desa tidak pernah memanfaatkan posyandu walaupun jarak tempunya dekat namun kondisi bangunan yang tidak layak kurangnya tenaga medis dan ketersediaan peralatan dan obat-obatan yang tidak ada sehingga masyarakat desa lebih memanfaatkan puskesmas yang terdapat di kecamatan atau langsung ke ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih relative mudah untuk dicapai dengan tenaga medis dan peralatan serta obat-obatan yang lengkap.

4.6. Kondisi Wisik Wilayah

Kondisi fisik wilayah merupakan bagian tertentu dari permukaan bumi yang mempunyai sifat khas tertentu sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan khusus antara kompleks lahan,air, udara,tanaman, binatang dan manusia. Kondisi fisik wilayah Desa Saponda dan Telaga Biru dilihat dari Jenis Bencana di desa (gempa, tanah longsor, banjir, kebakaran, dll). Desa Saponda setiap tahun mengalami banjir air pasang dengan luas wilayah bencana sejauh 0.5 km namun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi sebanyak 5 unit rumah masyarakat desa mengalami kerusakan yang cukup parah sedangkan di Desa Telaga Biru tidak pernah terjadi berbagai macam bencana sehingga tidak pernah menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan informasi di Desa Saponda dan Desa Telaga Biru tidak memiliki hutan lindung, taman nasional maupun suaka margasatwa. Namun di Desa Telaga Biru terdapat lahan kritis yang belum di manfaatkan

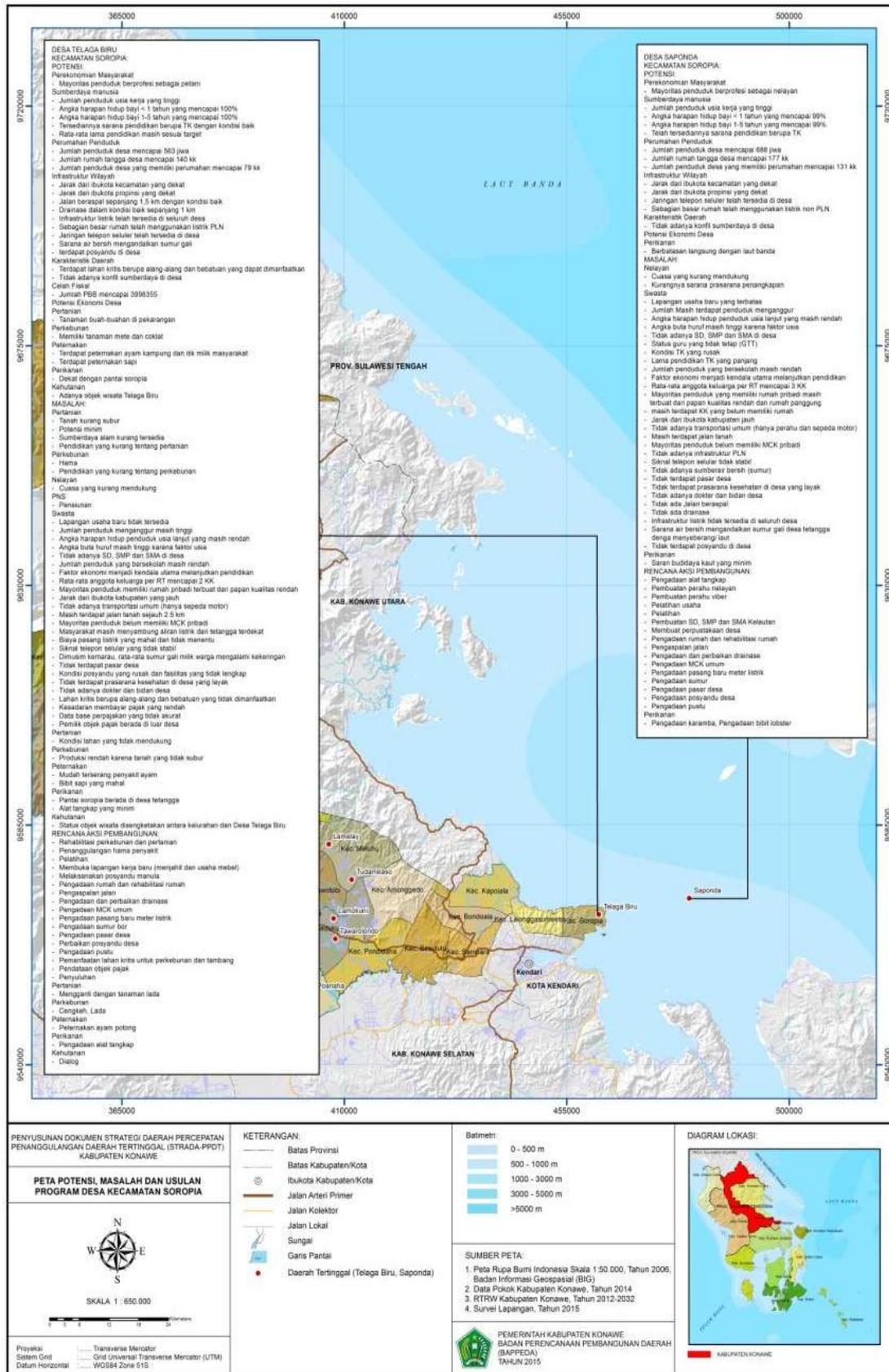
Tabel 16. Jenis Lahan Kritis (alang-alang, daerah berbatu, tanah kerangas, rawa, gambut dll) di Desa Saponda dan Telaga Biru Tahun 2015

Desa	Jenis Kawasan Lindung	Jarak rata2 dari desa (Km; M)	Luas Lahan Kritis (Ha)	Pemanfaatan Lahan Kritis	Hambatan Pemanfaatan
Saponda	Alang	0	0	0	0
	Daerah Berbatu	0	0	0	0
Telaga Biru	Alang	1	50	Jati	Lokasi Curam
	Daerah Berbatu	1.5	50	0	Lokasi bebatuan

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Desa Telaga Biru terdapat lahan kritis berupa alang-alang maupun daerah bebatuan yang berjarak 1 – 1,5 km dari desa dengan luas sekitar 50 ha. Lahan alang-lang baru dimanfaatkan untuk tanaman jati sedangkan daerah bebatuan belum dimanfaatkan dikarenakan daerah bebatuan tersebut masih disengketakan antara pihak kelurahan dengan Desa Telaga Biru. Sengketa batas desa dan keluarah tidak sampai menimbulkan konflik lahan dan sumberdaya alam sehingga kondisi desa relative aman.

Peta potensi dan permasalahan pada lokasi sampel desa tertinggal (Desa Telega Biru dan Desa Saponda) di Kecamatan Soropia dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. Peta Potensi dan Permasalahan pada Desa Desa Saponda dan Telaga Biru

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan mengacu pada tujuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Desa Saponda memiliki potensi yang meliputi potensi perekonomian masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, jumlah penduduk usia kerja yang tinggi yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, mayoritas kepala keluarga telah memiliki perumahan, infrastruktur wilayah yang cukup memadai yang diusahakan secara swadaya serta potensi ekonomi desa yang berasal dari hasil perikanan tangkap. Desa Telaga Biru memiliki potensi meliputi potensi perekonomian masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, jumlah penduduk usia kerja yang tinggi, mayoritas kepala keluarga telah memiliki perumahan, infrastruktur wilayah yang telah memadai, nilai celah fiskal yang berasal dari PBB mencapai Rp.3.988.555,- potensi ekonomi desa berasal dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- b. Permasalahan yang ditemui di Desa Saponda yaitu kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan budidaya perikanan dan penangkapan ikan sehingga beberapa masyarakat menggunakan bom untuk menangkap ikan, lapangan usaha baru yang terbatas sehingga masih terdapat penduduk yang menganggur, jumlah penduduk yang bersekolah masih rendah karena tidak terdapatnya sarana pendidikan berupa SD, SMP dan SMA di desa serta tingginya angka putus sekolah yang juga disebabkan oleh faktor ekonomi, tidak adanya infrastruktur PLN, telekomunikasi, sanitasi, kesehatan serta MCK, tidak adanya sarana transportasi umum serta tidak adanya pasar desa yang mendukung perekonomian masyarakat. Permasalahan yang ditemui di Desa Telaga Biru yaitu kondisi tanah yang kurang subur untuk mendukung kegiatan pertanian, produksi perkebunan yang rendah, banyak ternak yang terserang penyakit, sarana prasarana perikanan budidaya dan penangkapan yang minim, lapangan usaha baru tidak tersedia sehingga jumlah penduduk menganggur yang tinggi, tidak adanya SD, SMP dan SMA di desa sehingga jumlah penduduk yang tidak bersekolah masih tinggi, tidak adanya infrastruktur, sanitasi, kesehatan serta MCK, tidak adanya pasar desa yang mendukung perekonomian masyarakat.

6. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Banyaknya permasalahan yang teridentifikasi dan atas dasar pertimbangan aspek perekonomian masyarakat, SDM, infrastruktur, perumahan, aksesibilitas, keuangan desa, dan karakteristik fisik wilayah dalam percepatan pembangunan desa tertinggal, maka diperlukan strategi dalam percepatan penanggulangan daerah tertinggal pada desa pesisir dalam kecamatan di Kabupaten Konawe.

7. REFERENSI

- Bappenas. 2004. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Jangka Menengah 2005-2009. Jakarta
- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. 2004. Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe, Tahun 2012-2033.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015–2019
- Wanggai, V.V. 2004. Rencana Kerja Sub-Direktorat Kawasan Tertinggal. Bappenas. Jakarta.